

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Demokrasi merupakan suatu sistem yang memungkinkan siapa saja dapat berpartisipasi dalam berbagai lini politik yang terdapat dalam seluruh sistem politik. Pada perkembangan demokrasi saat ini, dengan mudah naik atau turunnya kedudukan dan status sosial seseorang, hal ini dikarenakan bebasnya partisipasi, kesamarataan dan pengakuan atas HAM dalam bentuk apapun pada politik. Demokrasi dalam hal kepemimpinan, secara rasional jika mendapat kepercayaan dan diakui kemampuan seseorang maka citra, status, dan elektabilitas di mata publik akan beranjak naik, dan begitu pula sebaliknya, jika kepercayaan tidak diperoleh dan kemampuan tidak diakui, maka citra, status dan elektabilitasnya beranjak turun¹. Demokrasi mengkondisikan publik menerima dan mengakui kemampuan seseorang yang layak dalam sosial dengan pemberian legitimasi dan kepercayaan masyarakat². Maka dibentuklah sebuah sistem dalam demokrasi untuk menyalurkan aspirasi, legitimasi dan kepercayaan yaitu melalui pemilihan umum. Melalui pemilu seseorang dapat memilih, dipilih, dan berproses di dalam politik

¹ Syaiful Mujani, R. William Liddle, Kuskridho Ambardhi, 2012, *Kuasa Rakyat*, Jakarta, penerbit Mizan. Hlm. 319

² Robert A. Dahl, 1999, *On Democracy*, diterjemahkan A. Rahman Zainuddin, 2001, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Jakarta; Yayasan Obor. Hlm. 67.

sesuai ketentuan yang dibentuk atas dasar normatif, nilai dan hukum yang berlaku dalam ruang wilayah suatu bangsa.

Negara Indonesia, sebagai negara demokrasi melakukan pemilu sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh hukum perundang-undangan. Pada setiap 5 tahun diadakan pemilihan presiden dan wakilnya (Pilpres), serta pemilihan legislatif (Pileg) diselenggarakan melalui sistem pemilu. Sedangkan untuk pemilihan pimpinan wilayah atau kepala daerah melalui Pilkada³. Pilkada merupakan salah satu wujud dari ruang partisipasi yang disediakan sistem demokrasi pada tingkat wilayah yang lebih kecil dalam suatu wilayah negara khususnya Indonesia. Ini yang disebut sebagai pesta demokrasi di daerah atau demokrasi lokal. Pemilihan kepala daerah melalui pilkada menjadi agenda rutin sebagai negara demokrasi.

Dalam azas berdemokrasi laki-laki dan perempuan mendapat tempat yang setara dalam mengikuti kegiatan politik dan menyalurkan hak politik. Mereka juga tidak dibatasi keikutsertaannya dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres di Indonesia. Hanya saja sebagai seorang kandidat pejabat publik memiliki kriteria yang khusus dalam seleksi kelayakan untuk dipilih oleh publik dan diatur dalam undang-undang (UU)⁴. Walaupun sudah setara dalam normatif dan nilai-nilai demokrasi antara perempuan dan laki-laki, kaum perempuan di banyak negara-negara penganut

³ Indonesia bisa dihitung bahwa baru melakukan Pilkada serentak baru dilakukan 2 kali yaitu tahun 2015 dan tahun 2017. Sebelumnya Pilkada merupakan tanggung jawab DPRD hingga tahun 2004. Daerah yang pertama kali melakukan Pilkada daerah yaitu DKI Jakarta Tahun 2007. Khusus daerah penelitian, yaitu Indramayu dan Karawang, masing-masing telah melakukan pilkada 2 kali semenjak 2010-2015 dan 2015-2020. Merujuk undang-undang Pemilu negara Indonesia, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pilpres, Pileg dan Pilkada.

⁴ Ibid., Hlm. 117.

demokrasi mewajibkan keikutsertaan perempuan pada kuota tertentu⁵. Hal ini disebabkan budaya politik negara tersebut didominasi oleh laki-laki atau disebut sebagai *patriarki* politik yang sering mengakibatkan kaum perempuan berpartisipasi secara pasif dan hanya sekadar melakukan hak aspirasi seperti halnya yang terjadi di Indonesia⁶.

Demokrasi memang ruang yang memfasilitasi kedua gender (laki-laki dan perempuan) tanpa adanya diskriminasi atau pemisahan peran sosial. Dengan dipakainya demokrasi sebagai sistem suatu negara dalam penyelenggaraan pemerintahannya, maka pemerintahan tersebut akan menjamin hak asasi manusia sebagai acuan mereka memberikan peluang-peluang terbuka bagi kesetaraan gender. Asumsi peneliti ini sesuai dengan konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Robert Dahl, bahwa pilihan suatu bangsa dalam memilih sistem demokrasi didasari oleh beberapa hal seperti jaminan terhadap kesempatan yang luas untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi, dan perlindungan terhadap hak dasar atau HAM⁷.

⁵ Negara yang menerapkan kuota minimal keikutsertaan perempuan atau Affirmative Action yaitu Rwanda, Pakistan, Argentina dan Skandinavia. Merujuk Irma Latifa Sihite, Desember 2011, Penerapan Affirmative Action sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia. Tesis. *Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum*. Universitas Indonesia Hlm. 49-53

⁶ Tri Marhaeni Pudji Astuti, Citra Perempuan dalam politik, *Jurnal Studi Gender & Anak Yin Yang*, Pusat studi gender STAIN Purwokerto, Vol. 3 (1) Jan-Jun 2008. Hlm 3-16. Penelitian ini mendeskripsikan dominasi laki-laki dalam bidang politik di Indonesia dan menyatakan demokrasi di Indonesia belum berkembang kearah kesetaraan gender. Jika dibandingkan dengan Eropa dan Amerika, demokrasi di Indonesia cukup diskriminatif terhadap perempuan, hal itu disebabkan oleh budaya politik, sosial dan ekonomi di Indonesia.

⁷ Dahl, 1991, *Op.cit.*, Hal. 61-111.

Demokrasi dengan uraian di atas sangat identik dengan pemilu sebagai proses penyeleksian kepemimpinan melalui sistem aspirasi dan bentuk partisipasi secara langsung. Kepemimpinan merupakan hubungan antar manusia, yaitu hubungan mempengaruhi, hubungan kepatuh dan taatan para pengikut atau bawahan karena dipengaruhi oleh pemimpin⁸. Dalam kepemimpinan terdapat beberapa unsur-unsur, yaitu: 1) kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, 2) kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain, 3) untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok⁹. Dengan demikian, karakteristik kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang mempunyai pengetahuan serta kewibawaan di atas rata-rata kelompok yang dipimpinnya, selain itu dapat memengaruhi dan mengarahkan anggotanya sehingga dalam suatu kelompok akan tercapai tujuan yang diinginkan antara pemimpin maupun anggota. Dalam teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh George R. Terry bahwa kepemimpinan merupakan penggeneralisasian satu seri perilaku pemimpin beserta konsep-konsep kepemimpinannya, dengan mempertimbangkan latar belakang historis kemunculan pemimpin dan kepemimpinan serta untuk menjadi pemimpin, termasuk juga di dalamnya sifat-sifat utama pemimpin, tugas pokok, dan etika kepemimpinan¹⁰.

Pemimpin disebut sebagai pribadi yang memiliki kelebihan dan kekuasaan sebagai motor yang menggerakkan orang lain agar melakukan usaha bersama demi tujuan yang ingin dicapai, dengan demikian pemimpin mendapatkan pengakuan

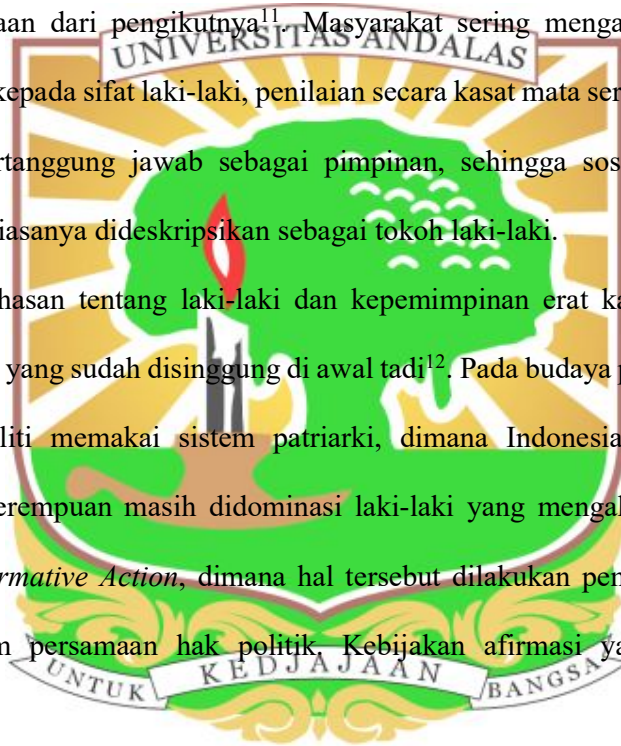
⁸ Kartini kartono. 2013. *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?.* Jakarta; PT Raja Grafindo Persada. Hal 2.

⁹ Ibid., hal 57-58

¹⁰Ibid., Hal 51

dan penghargaan dari pengikutnya¹¹. Masyarakat sering mengarahkan karakter pemimpin ini kepada sifat laki-laki, penilaian secara kasat mata sering menilai laki-laki dapat bertanggung jawab sebagai pimpinan, sehingga sosok wibawa dan berpengaruh biasanya dideskripsikan sebagai tokoh laki-laki.

Pembahasan tentang laki-laki dan kepemimpinan erat kaitannya dengan sistem patriarki yang sudah disinggung di awal tadi¹². Pada budaya politik Indonesia menurut peneliti memakai sistem patriarki, dimana Indonesia secara sejarah keterlibatan perempuan masih didominasi laki-laki yang mengakibatkan adanya kebijakan *Affirmative Action*, dimana hal tersebut dilakukan pemerintah sebagai langkah dalam persamaan hak politik. Kebijakan afirmasi yaitu kuota 30%



¹¹ Ibid., Hlm 51

¹² Dalam sejarah dan perkembangan peradaban kebudayaan Asia, bahwa pola pikir masyarakat cukup bertumpu pada peran laki-laki dan apa yang dapat laki-laki lakukan. Sehingga tidak aneh bahwa pada budaya Asia dan Afrika, peran perempuan sangat kecil dan mengurus hal-hal yang bersifat sekunder dan hiburan, yang dapat tercermin dalam berbagai hasil artefak fisik, seni dan kebudayaan yang ditinggalkan hingga saat ini. Salah satu contoh kebudayaan diskriminatif terhadap perempuan yaitu kebudayaan Jepang, perilaku dominasi terhadap perempuan cukup yang terjadi adalah perempuan sebagai pemuas nafsu belaka. Merujuk Nawal El Saadawi, 2011, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Di mana Nawal menyoroti dominasi sosial laki-laki dan kesetaraan gender di wilayah Asia timur dan Afrika pada kasus perempuan dalam budaya Arab, Israel, dan Afrika, perilaku diskriminatif terhadap perempuan tercermin pada kasus-kasus kekerasan seksual perempuan yang hampir setiap hari didengar. Baik sebelum Islam datang maupun setelah Islam datang, hanya berbeda dalam jumlah angka. Dengan demikian Saadawi memberikan indikator bahwa perlakuan terhadap perempuan suatu wilayah atau negara dapat menjadi tolak ukur pada kedewasaan dan pengakuan hak-hak perempuan, di mana perempuan lebih dihargai dan dilindungi sebagai anggota masyarakat yang sama, menjadi bebas dan merasa aman, tidak terintimidasi di mana pun ia tinggal. Di India juga tidak sulit mendapatkan kasus pemerkosaan di mana pernah terdapat perlakuan pemerkosaan yang hampir melibatkan seluruh pemuda di sebuah desa di India, hal ini menandakan bahwa perempuan belum diakui secara sadar akan peran perempuan dalam sosial yang maju dan berpendidikan. Di Eropa, perempuan dianggap lebih beruntung, karena menurut Nawal, perempuan Eropa dalam era modern cukup bebas dalam peran sosialnya, tidak dipertimbangkan melalui agama dan penerimaan sosial. Walaupun gerakan kesetaraan gender diawali oleh wanita eropa, namun tidak berarti mereka langsung membuka diri dengan kehadiran perempuan. Perjalanan menembus sistem patriarki bagi perempuan pada awalnya cukup sulit. Namun dengan meningkatnya perempuan berpendidikan dan penerimaan masyarakat yang semakin percaya pada kemampuan perempuan yang sama dengan laki-laki, lambat laun menguat dan akhirnya di Eropa mengkerdalkan peran perempuan dianggap sebagai tindakan diskriminasi gender.

keterwakilan perempuan sebagai syarat partai politik yang akan mengikuti Pemilu¹³. UU ini berisi tentang kuota perempuan dalam dewan parlemen yang harus dipatuhi oleh seluruh partai yang mengikuti pemilu¹⁴. Dengan adanya undang-undang ini kita dapat melihat tentang gambaran keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia yang masih dikatalisasi oleh hukum.

Pembagian peran kerja antara laki-laki dan perempuan seringkali menyebabkan kesenjangan gender pada masyarakat tradisional, karena laki-laki biasanya bekerja di sektor publik sedangkan perempuan berada di sektor domestik¹⁵. Menurut Astuti, faktor utama yang menghambat kesempatan perempuan untuk masuk kedalam dunia politik yaitu pandangan stereotip tentang dunia politik adalah dunia yang penuh persaingan, penuh perdebatan, dan membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, yang kesemuanya itu diasumsikan hanya dapat dilakukan oleh laki-laki¹⁶.

Persepsi berasal dari Bahasa Inggris *perception* yang artinya persepsi, penglihatan, tanggapan; yaitu proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungan melalui indera-indera yang dimilikinya atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera¹⁷. Persepsi merupakan

¹³ Affirmative Action di Indonesia dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Hlm 121,

¹⁴ UU Nomor 7 tahun 2017, Ibid.,

¹⁵ Menurut Supartiningsih, data statistik di seluruh dunia selalu menunjukkan bahwa angka partisipasi perempuan dalam pasar kerja dan politik selalu lebih kecil dari laki-laki. Merujuk Hadiatus Sarifah, Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan (Studi Kasus Desa Grogol Beningsari Dan Desa Petanahan, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen), 2016, Skripsi, Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.

¹⁶ Hadiatus Sarifah, Ibid.,

¹⁷ Sarbaini, Harpani Matnuh, Zainal, Mei 2015. Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik Di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 5, (9), Universitas Lambung Mangkurat. Hlm. 737

suatu proses yang diawali oleh penginderaan yang akan menghasilkan sebuah citra atau *Image*¹⁸. Pada proses penginderaan terjadi perekaman fenomena yang akan menjadi sebuah analisis pada diri seseorang sebagai proses belajar yang menghasilkan komponen kognitif, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yang juga akan menjadi komponen-komponen persepsi. Proses selanjutnya merupakan proses pembentukan persepsi dimana terjadi saling berpengaruhnya komponen-komponen pembentuk persepsi, dan terbentuklah sebuah pandangan dan pendapat yang kita sebut sebagai persepsi. Dalam penelitian ini peneliti akan membandingkan persepsi politik masyarakat, persepsi politik masyarakat merupakan modal dasar pembentuk orientasi politik secara kognitif bagi individu yang memiliki persepsi dan citra dari objek persepsi, yang nantinya mengakibatkan bentukan perilaku politik yang sesuai dengan persepsi yang telah dibangun¹⁹.

Perbandingan politik merupakan studi yang membandingkan kegiatan politik dalam berbagai kategori atau bagian, kajian perbandingan politik biasanya terkait dengan teori-teori budaya politik, sistem politik, elit massa politik atau kelas, dan teori pembangunan politik²⁰. Peneliti berasumsi bahwa melalui studi perbandingan politik akan mendapatkan jawaban bagaimana persepsi masyarakat di wilayah yang memiliki adat istiadat budaya dan sistem kekerabatan yang sama dipimpin oleh kepemimpinan perempuan. Maka peneliti memutuskan melakukan

¹⁸Elena Shestopal, *Qualitative and Quantitative Methods in Political Perception Studies*. Kajian yang dipresentasikan dalam *ECPR General conference*, Glasgow, (September 2-6. 2014) Lomonosov Moscow State university, Department of Political science. Hlm. 115-131

¹⁹Ibid.,

²⁰Ronald H. Chilcote menjelaskan tentang ruang lingkup Perbandingan Politik dan perkembangannya. Hal ini juga disebut sebagai teori-teori yang sering digunakan dalam studi perbandingan politik. Ronald H. Chilcote. 2007. *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

penelitian perbandingan persepsi politik masyarakat agar kita dapat melihat jika salah satu dari objek penelitian ini telah mengakui kesetaraan gender, yang menggambarkan proses demokratisasi telah berkembang cepat dan berhasil dilakukan oleh pemerintah setempat, karena bagaimanapun hal ini akan menabrak nilai-nilai sistem lama dan cukup tradisional yang secara budaya politiknya menyatakan bahwa perempuan tidak memiliki peran yang cukup berpengaruh kecuali memiliki faktor di luar kebiasaan.

Dengan realitas budaya patriarki yang ada di Pulau Jawa khususnya, akan menyulitkan perempuan yang memulai karir politiknya dari nol walaupun hanya di wilayah kabupaten²¹. Jadi perbandingan politik akan mengungkap dari kedua objek ini apakah masih menggunakan persepsi yang merujuk budaya lamanya atau sudah terjadi kesetaraan gender di mana kepemimpinan perempuan diakui, dipilih secara rasional dan penuh kesadaran. Melalui perbandingan politik menganalisis perbedaan dan persamaan secara karakteristik objek penelitian, di mana karakteristik wilayah, fenomena dan tekstur masyarakatnya yang cenderung sama, maka melalui perbandingan persepsi politik peneliti berasumsi dapat melihat perbedaan diantara objek merupakan analisis yang akan melihat kekhasan suatu wilayah yang tidak dimiliki oleh wilayah lain, baik secara perkembangan demokratisasi dan politik, maupun faktor-faktor yang mendukung ke arah

²¹Anderson yang membahas tentang Budaya-budaya Politik di Pulau Jawa, tidak pernah menekankan, mengemukakan perempuan mendapatkan peran sosial yang penting selain pendukung suami dan anak dari belakang dan dari rumah, demikian juga dalam politik, hanya terdapat pola Ayah dan anak laki-laki saja yang dikemukakan dalam posisi sosial, ekonomi dan politik, kecuali perempuan tersebut kalangan keraton, dan akan mendapat posisi strategis jika dia mampu. Benedict R, O' G Anderson, "Kuasa Kata"(judul asli *Language and Power*) 1990, Mata Bangsa. Yogyakarta.

fenomena yang diteliti pada wilayah objek. Dengan demikian kita dapat mendeskripsikan perbedaan dan persamaan fenomena yang terjadi pada wilayah tersebut.

Di tengah-tengah adat budaya di Pulau Jawa yang cukup patriarki yang menggambarkan sempitnya ruang bagi perempuan berkecimpung dalam politik, fenomena banyaknya pemimpin-pemimpin perempuan seperti presiden, menteri, Gubernur, kepala daerah dan legislatif yang berasal dari kaum perempuan banyak terdapat di pulau Jawa, di tengah-tengah budaya yang patriarki dan dominasi laki-laki yang sangat banyak Pulau Jawa merupakan pulau yang paling banyak partisipasi politik perempuan, tercatat pada data Kemendagri, Kepala daerah perempuan di pulau Jawa yang aktif pada saat ini periode 2015-2020 terdapat 24 orang Kepala daerah (bupati/wakil dan walikota/wakil) yang tersebar di seluruh provinsi Pulau Jawa²². Data itu dari 35 kepala daerah perempuan di seluruh Indonesia. Sedangkan pada pilkada 2018 dari 570 pilkada, terdapat 101 calon kepala daerah perempuan (Gubernur/wakil, bupati/wakil dan walikota/wakil), artinya 17% merupakan calon perempuan. Sejumlah 39 orang perempuan merupakan calon kepala daerah berarti 7% pencalonan perempuan berasal dari Pulau Jawa²³.

Berdasarkan data di atas provinsi Jawa barat khususnya, terdapat 6 daerah yang dipimpin oleh kepala daerah daerah perempuan yang masih aktif hingga

²² Website Informasi Pilkada KPU RI. Website <https://infopemilu.kpu.go.id>. 20 April 2018. 15.00 WIB.

²³ Ibid.,

sekarang (2018)²⁴. Daerah tersebut terdiri 5 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Indramayu, Karawang, Bekasi dan Purwakarta. Sedangkan satu kota yaitu Kota Bogor²⁵. Khusus pada Kabupaten Indramayu dan Karawang, kedua daerah ini sudah dipimpin oleh kepala daerah sejak Pilkada 2010 dan merupakan wilayah kabupaten yang dipimpin oleh para petahana yang berasal dari kaum perempuan.

Pada kondisi kesukuan, Kabupaten Indramayu merupakan daerah yang dihuni oleh masyarakat Suku Jawa di bawah pengaruh Cirebon. Sedangkan Kabupaten Karawang merupakan daerah yang dihuni mayoritas Suku Sunda, namun tidak masuk ke dalam daerah *Parahyangan*, Karawang merupakan sunda utara yang dari sudut bahasanya berbeda dialek dengan Sunda Parahyangan. Dari sisi sistem kekerabatan, Indramayu dan Karawang merupakan daerah yang memiliki sistem kekerabatan *parental* atau garis keturunan dan ruang lingkup kekeluargaan dapat ditarik dari ibu dan ayah dalam keluarga²⁶. Menurut Hazairin, Budaya Sunda dan Jawa merupakan budaya yang menarik nasab dari ayah dan ibu, peran kepala keluarga tetap diambil dari peran ayah, dan waris dipertimbangkan dari dua belah pihak²⁷.

²⁴Dikutip dari data Kemendagri tahun 2015 dan Situs Pilkada 2015 dengan website: pilkada2015.kpu.co.id. diakses pada 04 Februari 2018 pada jam 02.00 wib.

²⁵ Pada data di atas, 6 daerah tingkat II yang dipimpin oleh kepala daerah perempuan masih memiliki masa jabatan sampai sekarang dan ada kepala daerah yang tersandung Korupsi hingga diberhentikan pada November 2018, yaitu Kepala daerah Bekasi. Sedangkan kepala daerah Indramayu saat ini juga ingin mengundurkan diri pada 13 November tahun 2018 dengan alasan keluarga. Data-data tersebut dikutip dari Daftar kabupaten dan kota di Jawa Barat - Wikipedia bahasa Indonesia, Wikipedia.com, ensiklopedia bebas yang diakses pada 11/1/2019 20:16 Wib.

²⁶ Hazairin dalam Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Rajawali Pres, 2017. Hlm 52. dikutip juga dari Sistem kekerabatan Sunda, dikutip dari website: Anjungan JABAR, alamat website anjubar.go.id. diakses 25 Juli 2018 jam 22:16 WIB

²⁷ Berdasarkan pernyataan Hazairin, Lir Abdul Haris mengklasifikasikan sistem kekerabatan suku sunda sebagai Parental/bilateral yang digambarkan dalam Lir Abdul Haris, Pranata Keluarga Muslim Dalam Sistem Kekerabatan Parental Sunda Ilmu Dakwah: *Academic Journal for Homiletic Studies* Vol. 4 150 No. 11 Januari-Juni 2008. Hlm 150-176. Dikutip juga dari Jakob Sumardjo. (2007). "Paham Kekuasaan Sunda." *Harian Umum Pikiran Rakyat*. 1 Januari 2007

Pada sudut pandang kekuasaan, sistem patriarki merupakan sistem kekuasaan dimana laki-laki mendominasi segala lini hak-hak kepemilikan, wewenang dan pengaruh²⁸. Menurut teori sistem patriarki yang dikembangkan oleh Sylvia Walby di bagi atas dua bagian yaitu patriarki *privat* dan patriarki publik²⁹. Patriarki privat diartikan sebagai kekuasaan dalam ruang-ruang pribadi yaitu dalam keluarga, dan patriarki publik merupakan bentuk luas atau ekspansi dominasi kekuasaan laki-laki pada sektor publik atau negara, hingga membentuk sebuah tatanan cara, kebiasaan dan norma yang dianggap sebagai hal yang dipandang umum oleh masyarakat yang menjalankan sistem patriarki tersebut.

Kabupaten Indramayu yang didominasi Suku Jawa dinilai cukup patriarki. Menurut Tanti Hermawati, patriarki Suku Jawa berawal dari ukuran fisik dan kerja otot laki-laki serta tanggung jawab laki-laki yang wajib mengayomi perempuan³⁰. Hal ini yang memberikan otonomi dan wewenang laki-laki yang menyebabkan berkembangnya peran sosial yang terbatas oleh jenis kelamin dan menguntungkan kaum laki-laki³¹. Sedangkan Kabupaten Karawang yang mayoritas masyarakat merupakan Suku Sunda juga dinilai memakai sistem patriarki dalam sosialnya.

Priadi Surya, Oktober/2010, Kepemimpinan Perempuan Bernilai Kesundaan di Bidang Pendidikan, Jurnal Manajemen Pendidikan, Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY dan Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia. Hal 64-77

²⁸Menurut kamus Bahasa Indonesia. Departemen pendidikan dan kebudayaan. Balai pustaka 2001. Hlm 654. Kata Patriarki diartikan sebagai tata kekeluargaan yang sangat mementingkan garis keturunan bapak, dimana dalam kongkritnya menguasai seluruh anggota keluarga, harta miliknya, serta sumber-sumber ekonomi dan keputusan penting bagi keluarga. dalam sistem sosial budaya dan keagamaan patriarki muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan, serta ada pendapat yang lebih lebih ekstrim lagi dimana perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki. Sehingga muncul istilah yang akan menghancurkan sebuah kesuksesan dan godaan dunia adalah Harta, tahta dan Wanita.

²⁹Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, Cambridge Center, USA, 1991. Hlm. 1-24.

³⁰Tanti Hermawati, Budaya dan kesetaraan Gender, *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol 1. Juli 2007. Hlm 18-24

³¹Ibid., 18

Istilah Ratu berasal dari Kerajaan Galuh (Sunda) dimana kerajaan tersebut merupakan bentukan baru kerajaan Tarumanegara yang nantinya menjadi awal dari kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Istilah ratu pada awalnya tidaklah menjadi hal yang identik dengan perempuan, karena berarti pemimpin atau pimpinan tertinggi³². Terkait adanya perempuan sebagai pemimpin Sunda pada zaman kerajaan dulunya, dikarenakan status derajat kebangsawanan perempuan tersebut dan juga tidak ada laki-laki yang bisa mewarisi tahta saat itu³³. Menurut Nina Murmila, antara sunda dan Jawa, dalam hal kekuasaan kedua suku ini patriarki walaupun garis keturunan parental namun secara kekuasaan dalam keluarga dan publik dikuasai oleh laki-laki³⁴. Pendapat itu juga didukung oleh Wahyuni, dengan sistem kekerabatan yang ada di Indonesia baik itu Patrilineal, Matrilineal atau parental tetap saja sistem kekuasaannya patriarki dimana laki-laki memiliki peran kunci dalam menentukan arah kekuasaan waris, cara pandang keluarga dan juga hal-hal terkait keputusan yang dijalankan oleh keluarga. Rata-rata, perempuan cukup menyetujui hasil dari campur tangan laki-laki dalam keluarga terhadap keputusan yang dibuat³⁵.



³²Ratu/Datu berarti Pemimpin Dalam Bahasa Sunda. Seperti halnya pemakaian Ratu pada Ratu Sanjaya (Raja Galuh dan pendiri wangsa Sanjaya di Kerajaan Medang, Mataram) dan Ratu Sima (perempuan berasal dari kerajaan kalingga/Ho-ling), kisah lokal yang menyatakan bahwa pemanggilan tersebut hanya terjadi di Era tersebut dan Ratu Sima merupakan pemimpin perempuan yang adil di kala itu, pemakaian istilah tersebut hilang pada akhirnya gelar Sri Maharaja dikemukakan sebagai gelar pimpinan tertinggi. Penempatan ratu pada posisi perempuan inilah yang dipakai hingga sekarang. Rujuk Soedjipto Abimanyu, 2017, Babad Tanah Jawi. Yogyakarta, Penerbit Laksana. Rujuk Raja-raja di Jawa Barat, id.wikipedia.org diakses 27/07/2018 jam 22:42.

³³Dikuti dari Ratu Sima dalam Catatan Tiongkok, Historia.Id, diakses 13 Januari 2019, 0.49 wib.

³⁴Nina Nurmila, Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya, *Jurnal Karsa*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Juni 2015. Hlm 2.

³⁵Wahyuni Retnowulandari, Budaya Hukum Patriarki Versus Feminis dalam penegakan Hukum persidangan Kekerasan terhadap perempuan, *Jurnal Hukum*, Vol 8, 3 Januari 2010. Hlm 16-28

Indramayu merupakan salah satu daerah yang diwajibkan untuk mengulang pemilihan presiden 2014 karena telah dibuktikan mengalami manipulasi suara dan kecurangan yang berimbas pada IKP (Indeks kerawanan Pilkada) tahun 2015 yang menunjukkan kemungkinan indikator IKP sangat banyak ditemui pada daerah ini dan dinilai cukup tinggi³⁶. Indramayu dipimpin oleh Anna Sophanah yang telah menjabat dua periode hingga 2020 nanti. Kemenangan Anna sophanah pada pilkada di kabupaten Indramayu, merupakan kemenangan besar. Pada data pilkada 2015, tingkat partisipasi pemilih pada pilkada 2015 Kabupaten Indramayu mencapai 59.73%. dari 1.386.605 total pemilih, yaitu sebanyak 828.168 orang pemilih. Kemenangan Anna Sophanah pada Pilkada yaitu 55.95% suara (452277 suara).



Tabel 1.1.
Akumulasi hasil Pilkada Indramayu 2015

No	Nama Calon	Perolehan suara	Persentase
1	Anna – Supendi	452277	55.95%
2	Toto – Wiguna	356040	44.05%
Jumlah pengguna hak suara		828.168	
Jumlah DPT		1386605	
Tingkat Partisipasi		59.73%	

Sumber: Situng Pilkada Indramayu 2015³⁷

Karawang saat ini dipimpin oleh dr. Cellica Nurrachadiana beliau merupakan wakil bupati sebelumnya dan mengikuti pilkada pada 2015 yang menjadikan beliau sebagai pemenang Pilkada, dengan perolehan suara 51% dari suara sah. Bupati Cellica Nurrachadiana ini merupakan bupati perempuan pertama

³⁶Indeks Kerawanan Pilkada 2015. Badan Pengawas Pemilu tahun 2014.

³⁷Dikutip dari Situng Pilkada 2015 KPU, <https://pilkada2015.kpu.go.id/indramayukab> diakses pada tanggal 11 Mei 2018 Jam 01.26

di Kabupaten Karawang, disebut sebagai pematah Mitos bahwa perempuan tidak akan memenangkan Pilkada. Tercatat dari 1.588.371 keseluruhan DPT, perolehan 531195 Suara Karawang, dengan tingkat partisipasi 67.18%. dengan jumlah pengguna hak pilih 1.067.077 suara.

UNIVERSITAS ANDALAS
Tabel 1.2.
Akumulasi hasil Pilkada Karawang 2015

No	Nama Calon	Perolehan suara	Persentase
1	Nace – Yenih	22538	2.11%
2	Akhmad – Dedi	197744	18.53%
3	Celliaca – Ahmad	531195	51%
4	Daday – Edy	80969	7.60%
5	Nanan – Asep	9051	0.84%
6	Mustopa – Iman	200112	18.75%
Jumlah pengguna hak suara		1067077	
Jumlah DPT		1588371	
Tingkat Partisipasi		67.18%	

Sumber: Situng Pilkada Karawang 2015³⁸

Peneliti lebih memilih objek penelitian yang berada di daerah Kabupaten ketimbang di Kota dengan pertimbangan tekstur masyarakat dan kesesuaian fenomena. Kabupaten memiliki daerah pedesaan³⁹. Menurut Roucek dan Warren, karakteristik kota dan desa pada tekstur masyarakat cukup signifikan perbedaannya, di desa kita dapat melihat bahwa ada peranan besar dari kelompok yang

³⁸Dikutip dari <http://pilkada2015.kpu.go.id/karawangkab/> website resmi hasil pilkada KPU RI. Diakses 07 April 2018 jam 20.20

³⁹Roucek dan Warren, mengemas karakteristik masyarakat pedesaan secara sederhana dan mengemukakan pandangannya terhadap karakteristik masyarakat desa dan kota. Di sini dijelaskan bahwa masyarakat desa memiliki karakteristik sosial dan secara psikologi yang berbeda dari masyarakat kota.

mendominasi yaitu kelompok elitis, adat atau keagamaan⁴⁰. Selain peranan kelompok dominasi, faktor geografik yang menjadi dasar berbagai kelompok atau asosiasi, hal ini disebabkan ikatan kelompok lebih erat dan jarak interaksi dengan kelompok lain bisa dikatakan jarang, kecuali disengajakan. Akibat geografik yang cukup luas, kepadatan yang cukup renggang, interaksi dalam kelompok di pedesaan cukup intens, yang berakibat pada masyarakat yang berkarakter homogen, lebih intim, cukup akrab, bertahan lama, dan juga mobilitas sosial rendah. Masyarakat desa juga menitikberatkan perekonomian pada keluarga sebagai unit ekonomi. Karakter terakhir masyarakat desa, populasi anak cukup banyak sehingga usia produktif lebih banyak. Secara Psikologi sosial masyarakat desa cenderung untuk konservatif dan *ortodoks*, hemat dan cermat, *fasalis*, curiga dengan orang luar, lebih banyak acara interaksi ketimbang di kota⁴¹.

Sedangkan karakteristik masyarakat perkotaan pengaruh kelompok bermain lebih kuat, mobilitas yang cukup tinggi, hubungan yang lebih terbuka dengan siapa saja, dan tidak intim⁴². Antara elit dan massa cukup jauh, tergantung pada kepentingan daripada kedaerahaan dan rasa kecintaan pada ikatan *primordial*, banyak tersedia barang, jasa dan pelayanan, ekonomi lebih kompleks dan cukup terbuka terhadap lingkungan. Atas dasar-dasar tersebut penelitian ini lebih cocok di kabupaten ketimbang di kota, karena masyarakat kabupaten atau pedesaan dinilai cukup homogen, dan untuk nilai-nilai tradisional lebih terasa atas faktor geografi, mobilitas sosial rendah, dan cukup selektif dengan hal yang baru. Kepemimpinan

⁴⁰Joseph. S. Roucek dan Rolan L. Warren, "Pengantar Sosiologi" (Judul asli Sociology an Introduction) diterjemahkan oleh Drs. Sahat Simamora. Bina Aksara, Jakarta. 2002. Hal 102-111.

⁴¹T. Lynn Smith. "The Sociology of Rural Life" New York, Harper & Brothers, 1940. Hal. 130

⁴²Op cit.,

perempuan dalam tatanan budaya tradisional di Jawa barat memang bukan hal yang baru secara sejarah, namun di era modern dan demokrasi ini, lain cerita ketika kelompok primer, atau kelompok yang mendominasi berhasil mengubah persepsi masyarakat secara fundamental. Melalui penelitian ini peneliti berusaha mengungkap persepsi politik masyarakat yang dipimpin oleh kepala daerah perempuan di tengah sistem budaya setempat yang patriarki di Jawa Barat. Daerah Indramayu dan Karawang dipilih sebagai lokasi penelitian, hal ini dikarenakan tekstur masyarakat pesisir utara Jawa yang diindikasikan homogen dengan tingkat IKP yang sama⁴³. Satu sisi bahwa perbedaan karakteristik kota dan desa menjadi salah satu alasan peneliti mengambil daerah kabupaten menjadi wilayah penelitian perbandingan persepsi ini.

Berdasarkan data tersebut maka dari itu peneliti akan mengangkat penelitian yang berjudul “Perbandingan persepsi politik masyarakat Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang terhadap kepemimpinan kepala daerah perempuan masa bakti 2015-2020”

1.2. Rumusan Masalah

Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang telah dipimpin oleh kepala daerah perempuan yang menjabat selama dua periode yaitu pada periode 2010-2015 dan 2015 -2020. Hal ini tidak sesuai dengan patriarki politik yang terjadi secara umum di Indonesia. Bupati aktif Indramayu saat ini, Anna Sophanah (Anna) yang lahir pada 23 Oktober 1953 merupakan istri dari Dr. H. Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin (Yance) yang merupakan bupati sebelumnya yang menjabat dari tahun

⁴³ Indeks Kerawanan Pilkada 2015, KPU.go.id, diakses 1 Februari 2018 pada jam 10.20 WIB

2000-2010 terpilih melalui pemilihan DPRD Indramayu. Anna melanjutkan kepemimpinan suaminya setelah terpilih melalui Pilkada Indramayu pada tahun 2010⁴⁴. Sebelumnya Anna berperan mendampingi kegiatan suami seperti menjadi ketua di berbagai organisasi seperti ketua tim penggerak PKK Kabupaten Indramayu tahun 2000-2010, ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) tahun 2000-2010, penasihat Gabungan Organisasi wanita (GOW) tahun 2000-2010, ketua Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) Indramayu 2004-2009, ketua DPD Pengajian Al- Hidayah Kabupaten Indramayu Tahun 2004 – 2009, dan ketua umum Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kab. Indramayu Tahun 2000 – 2010⁴⁵.

Pada kemenangan Pilkada Indramayu periode 2010-2015, Anna dan wakilnya Supendi berhasil mengalahkan 5 pasang kandidat saingannya, dengan perolehan suara 60.78% suara. Saingannya pada saat itu adalah Uryanto Hadi-Abdul Jalil meraih suara 14.78%, Gorry Sanuri –Ruslandi yang memperoleh 11.33% suara, Toto Sucartono-Kasan Basari dengan perolehan 5.65% suara, Api Karpi-Ruwita 5.36% suara, dan terakhir Mulyono Martono-Handaru Wijayakusumah dengan perolehan 2.10% suara. Jika kita melihat dari statistiknya, Anna dan Supendi berhasil mengalahkan 5 pasangan laki-laki lainnya dengan telak. Kemenangan ini yang menimbulkan perselisihan diantara kandidat, dikarenakan

⁴⁴Anna Sophanah berebut dukungan Partai Golkar pada Pilkada 2010 dengan anaknya Daniel Muttaqin, namun karena posisi Anna lebih kuat dalam partai, dukungan Golkar tidak didapat dan tidak lolos verifikasi KPU Indramayu. Lihat Berita Online Kompas, 19 Mei 2010, “Rezim Keluarga di Pilkada”, Kompas.com.

⁴⁵Merujuk pada website resmi Kabupaten Indramayu, Bupati Indramayu dalam indramayukab.go.id diakses tanggal 06 Juni 2018, 10.23 WIB.

terdapat kecurangan, tindakan represif dan mobilisasi massa yang dilakukan pendukung Anna-Supendi hingga masuk ke persidangan Mahkamah Konstitusi⁴⁶.

Peneliti berasumsi bahwa pengikut setia dari Yance berpengaruh besar pada kemenangan Anna Sophanah yaitu sebanyak 60,78% suara pada Pilkada 2010, dan 55,95% pada Pilkada 2015⁴⁷. Kemunculan Anna Sophanah sebagai Bupati Indramayu dipengaruhi kuat oleh jejaring oligarki politik di tingkat daerah, dalam hal ini yang terjadi di Kabupaten Indramayu. Kuatnya kuasa politik suaminya, menjadi faktor yang mempengaruhi kemunculan dan kemenangan Anna dalam dua periode pilkada langsung di Kabupaten Indramayu⁴⁸.

Namun dari sisi kinerja, ketokohan, prestasi Indramayu dan pribadi Anna tidak bisa dipandang sebelah mata. Di antara prestasinya yang berhasil peneliti temukan selama menjabat bupati Indramayu hingga saat ini yaitu menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI (2016), Anugerah Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi (2016), Piala Adipura ke-9 kalinya (2017), Penghargaan sebagai daerah peduli Disabilitas (2017), Piala Adhiwiyata

⁴⁶Kelima pasang calon, saingan dari Anna-Supendi memperkarakan sengketa Pemilu Indramayu 2010 yang dilaporkan pada 14 September 2010. Namun MK pada tanggal 24 September 2010 menolak seluruh permohonan pemohon dengan alasan tidak terbukti dan tidak berlandaskan hukum pada seluruh pelanggaran seperti Administrasi, politik uang, intimidasi PNS dan KUU (kepala desa) dalam memobilisasi massa. Merujuk pada Berita Online Republika.co.id tentang “MK gelar sidang perselisihan Pemilu Indramayu”, Jumat, 17 September 2010 Jam 04.31 Wib. Berita Hukum Online, www.hukumonline.com tentang “MK Tolak Sengketa Pemilu Indramayu”, Sabtu, 25 September 2010. diakses pada 06 Juni 2018, Jam 10.47 Wib.

⁴⁷Merujuk dari Berita Online Republika, 10 Agustus 2010, “Menang Pemilu, Istri Bupati Indramayu akan Gantikan Suaminya”, Republika.co.id. dan rujuk juga Situs Pilkada 2015, Pilkada2015.kpu.go.id, Website resmi hasil pilkada KPU RI. Diakses 07 April 2018 jam 20.20

⁴⁸Demokratisasi dinilai tidak dirasakan publik Indramayu selama Yance berkuasa. Yance mampu membalikkan tradisi kampanye politik di wilayah Islam yang secara umum bicara mengenai pelarangan perempuan menjadi pemimpin. Berdasarkan hasil penelitian Tim Gender & Politik Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2016. Atika Nur Kusumaningtyas, 2017. “Perempuan Kepala Daerah Dalam Jejaring Oligarki Lokal” Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jurnal Penelitian Politik | Volume 14 No. 2 Desember 2017.

Mandiri (2016), Juara Pertama Lomba Desa Tingkat Nasional (2016), Penghargaan Nugra Jasadarma Pustaloka kategori Birokrat yang Peduli terhadap Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca dari Perpustakaan Nasional RI (2016), Piala UKS dalam Lomba Sekolah Sehat (LSS) dari pemerintah pusat (2016), kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) satu digit tahun (2016), meraih gelar “Bunda Literasi” (2016), Tiga kali meraih Kartini Award (2014, 2015 dan 2016) dan menempati urutan ke 17 dari 71 Indonesian Inspiring Women 2016⁴⁹.

Sedangkan sebagai kepala daerah pembanding yaitu bupati aktif Kabupaten Karawang, Cellica Nurrachadiana (Cellica) yang lahir pada tanggal 18 Juli 1980 merupakan seorang lulusan kedokteran umum Universitas Maranatha Bandung. Cellica mengawali karir politik setelah tergabung dalam anggota DPRD Jawa Barat tahun 2009-2014. Namun pada tahun 2010, beliau mendampingi H. Ade Swara maju sebagai cabup-cawabup 2010-2015 yang akhirnya mereka menangkan, dan memberikan sebuah prestasi pada Cellica sebagai wakil bupati termuda se-Indonesia⁵⁰. Selain itu Cellica telah bergabung dalam beberapa organisasi mulai

⁴⁹Data diatas merupakan rangkuman prestasi dari periode 2015-2020 Kabupaten Indramayu, merujuk pada Berita online Jalur Pantura, 06 Agustus 2017, “Indramayu Raih Adipura Kesembilan Kalinya”. Jalurpantura.com. Berita Online Kabupaten Indramayu, Juli 2016, “Anna Sophanah Raih Satyalencana Pembangunan Koperasi” Indramayukab.co.id. Berita Online Media Indonesia, Senin, 07 Agustus 2017, “Adipura, Antara Gengsi dan Prestasi - Kami di Jalan yang Benar”, Mediaindonesia.com. Berita online Humas Protokol Indramayu, Agustus 2016, “Keren, Anna Sophanah Masuk 71 Indonesian Inspiring Women 2016”, humasprotokolindramayu.com. Berita Online Info Publik, Rabu, 20 April 2016, “Gubernur Jabar Puji Bupati Indramayu” Infopublik.id. Berita Online Kabar Cirebon, 22 Agustus 2016 “Hj. Anna Sophanah”, kabar-cirebon.com. Berita Online Radar Cirebon, Sabtu, 23 Desember 2017 21, “Peduli Disabilitas, Bupati Indramayu Raih Penghargaan”. Selasa, 13 Desember 2016, “Bupati Annna Jadi Bunda Literasi”, dan Rabu, 22 April 2015, “Anna Sophanah Kembali Raih Kartini Award”, Radarcirebon.com. seluruh berita diakses 06 Juni 2018, 11:27 WIB.

⁵⁰Tahun 2014 Ade Swara ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena melakukan pemerasan terhadap sebuah perusahaan. Ade kemudian menjadi terdakwa, dan ia diberhentikan sebagai Bupati Karawang oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Pada Desember 2014 Cellica diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Karawang. Berita Online Obsession News,

dari awal karirnya. Beberapa jabatan dan organisasi dari Cellica yang berhasil peneliti rangkum antara lain adalah sebagai Deklatur Koalisi Kerakyatan, Ketua Ikatan Istri Anggota Dewan (IKIAD) DPRD Provinsi Jawa Barat, Anggota Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Jawa Barat, Ketua cabang olahraga Anggar Kabupaten Karawang, Ketua Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PERWOSI) Karawang, Dewan penasehat Karang Taruna Kabupaten Karawang, Dewan penasehat Persatuan Sepak Bola Indonesia Karawang (PERSIKA Karawang), Dewan penasehat Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Karawang, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Karawang, Ketua Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) Karawang, dan Dewan Penasehat Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB)⁵¹.

Pada Pilkada Karawang 2010, Ade-Cellica berhasil menyingkirkan 4 calon lainnya dengan perolehan 38.80% suara, pada posisi kedua yaitu Sonny-Dadang dengan 30,05% suara, selanjutnya Eli-Abdullah dengan perolehan 16.02% suara, Karda-Deden dengan perolehan 12.70% suara, dan juru kunci ditempati oleh Warsa-Agustia dengan perolehan 2.43% suara. Ketentuan Pilkada Karawang saat itu belum ada mekanisme putaran kedua agar mencapai suara terbanyak, atau 50% dari suara sah. Hal ini menghasilkan bahwa Ade-Cellica menjadi pemenang Pilkada Karawang 2010. Para paslon kepala daerah Karawang yang kalah tidak puas dengan hasil pilkada tersebut dan memilih memperkarakan kemenangan pasangan Ade-Cellica dengan memberikan bukti tertulis dan terlampir, melaporkan pelanggaran

“Cellica Nurrachadiana Tempatkan Nilai Investasi Karawang Terbesar di Jabar”
Obsessionnews.com. Diakses 07 Juni 2018 Jam 02.33Wib.

⁵¹Profil dr. Cellica Nurrachadiana dikutip dari dr-cellicanurrachadiana.com diakses 07 Juni 2018, jam 01.26 wib.

dan kecurangan yang dilakukan Ade-Cellica beserta pendukungnya, mulai pelanggaran sistematis, politik uang dan ketidak-netralan pihak penyelenggara KPU Kabupaten Karawang. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak pelaporan tersebut dikarenakan tidak beralasan hukum dan tidak terbukti secara hukum⁵².

Pada Pilkada 2015, Kabupaten Karawang juga terdapat data kecurangan seperti yang dilansir oleh BBC Indonesia⁵³. Namun, seolah menampik hal-hal kecurangan dalam Pilkadanya, Celliaca membuktikan dengan beberapa prestasi yang diraihinya dari awal menjabat 2010 sebagai wabup hingga saat sekarang menjadi bupati. Beberapa capaian kinerja, prestasi daerah dan pribadi yang berhasil peneliti rangkum yaitu Alokasi dana APBD terbesar Ke 2 se-Indonesia untuk bidang pendidikan (35%) (2014), Anugerah Aksara Khusus (2015), Koran Sindo Award tahun 2016, Penghargaan Anugrah Dana Rakca (2016). Wanita Inspiratif versi Seven Media (2017), Penghargaan 10 Program Pokok PKK dan 5 Lomba Tingkat Provinsi Jawa Barat, Penghargaan Dana Hibah Revitalisasi Posyandu, Juara III Pelaksana terbaik Revitalisasi Penduduk Tahun 2017, Juara III Pelaksana Terbaik Kegiatan Gotong Royong Masyarakat (2017), Penghargaan Opini WTP LKPD (2016 dan 2017), penghargaan “Anugerah Perempuan Indonesia” (2017), Perempuan Tangguh (2017), Manggala Karya Kencana Kependudukan dan keluarga berencana (2017), Nilai Investasi terbesar di Jawa Barat (2017),

⁵²Hasil putusan terdapat dalam Putusan MK Nomor 213/PHDU.D-VIII/2010. Hlm 114-117.

⁵³Dikutip dari BBC Indonesia. www.bbc.com/berita_indonesia edisi 5 Desember 2015, tentang pilkada yang diwarnai politik uang pada pilkada karawang 2015. Situs berita ini diakses pada 12 April 2018 jam 01.43. BBC (British Broadcasting Corporation) merupakan media asing yang berasal dari UK (Inggris) yang cukup terpercaya dan netral meliputi televisi, radio, massa dan media online yang berfokus dalam bidang pemberitaan, pada kegiatan Politik BBC juga memiliki divisi khusus yaitu BBC Parliament. Rating tertinggi untuk kategori berita politik di dunia (BBC world) tahun 2011.

Democracy Award (2017), Penyerapan DIPA dan Dana Transfer Desa Tahun 2018 dan lain segudang prestasi dan capaian lainnya⁵⁴.

Dalam konsep persepsi politik masyarakat, persepsi dibentuk dari komponen kognitif atau pengetahuan masyarakat tentang hal yang diamatinya, dalam hal penelitian ini adalah kepemimpinan kepala daerah perempuan, yang bisa saja mereka dasarkan pada pengetahuan dalam pengalaman pribadi yang akan diinterpretasikan sebagai sebuah kemauan dan keinginan politik, pada akhirnya persepsi individu akan membentuk sebuah perilaku politik⁵⁵. Dalam konsep tersebut yang mempengaruhi persepsi salah satunya adalah faktor sosial demografi dimana di dalam faktor tersebut terdapat keadaan sosial, gender, pendidikan dan pekerjaan. Hal ini berarti ada pertimbangan tentang gender yang mempengaruhi persepsi masyarakat dalam memilih pada dua daerah penelitian yang dipimpin oleh kepala daerah perempuan, masyarakat pada daerah itu harusnya memiliki persepsi dan citra yang positif terhadap dukungan kesetaraan gender. Dalam gambaran awal

⁵⁴ Data di atas merupakan rangkuman tentang kepemimpinan Cellica Nurrachadiana. Dapat dilihat selengkapnya dan merujuk Berita Online Suara Karya, 23 Mei 2017, "Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana Terima 'Anugerah Perempuan Indonesia 2017', Suarakarya.id. Website Resmi Berita Jawa Barat, 22 Mei 2017, "Bupati Karawang mendapat Penghargaan sebagai PEREMPUAN TANGGUH Tahun 2017", Jabarprov.go.id. Republika Online, 16 Juli 2017, "Bupati Karawang Raih Penghargaan Program Kependudukan", dan 07 Juni 2017, "Pemkab Karawang Dua Kali Raih WTP" Republika.co.id. Berita Online Obsession News, "Cellica Nurrachadiana Tempatkan Nilai Investasi Karawang Terbesar di Jabar" Obsessionnews.com. Berita Online Karawang Today, 25 Oktober 2015, "Ciyeee, Bupati Karawang Dapat Kado Terindah Dari Mendikbud Nih", Karawangtoday.com. Berita Online Fakta Jabar, 21 Februari 2018, "Dua Tahun Pimpin Karawang, Bupati Cantik Ini Raih Segudang Prestasi", Faktajabar.co.id. Berita Online Potret Karawang, Desember 2016, "Inilah Prestasi Pemkab Karawang Selama 2016", Potretkarawang.com. RMOL Jabar, 29 Oktober 2017, "Sukses Pimpin Karawang, Cellica Raih Democracy Award RMOLJabar", rmoljabar.com. Seluruhnya diakses 07 Juni 2018 dalam rentang Jam, 23.00- 02.33Wib.

⁵⁵ Musty Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta; Rineka Cipta,1990, Hal.23. *Skripsi*, Nico Handani Siahaan, tahun 2013. Persepsi Masyarakat Medan Helvetia Terhadap Sistem Pemilihan Kepala Daerah Tahun 201, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

peneliti, masyarakat Indramayu dan Karawang memilih pemimpin secara rasional berdasarkan track record, prestasi dan kinerja yang nyata, tanpa mengindahkan rambu-rambu patriarki dan dominasi laki-laki dalam politik.

Walaupun pada beberapa titik, kepemimpinan Indramayu dan Karawang memiliki kesamaan, namun tentunya akan ada yang hal berbeda dalam persepsi masyarakat Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kawarang terhadap kepemimpinan perempuan. Berdasarkan data-data di atas, untuk mengetahui keunikan dan kekhasan pandangan masyarakat patrilineal terhadap kepemimpinan perempuan pada kedua daerah ini, perlu kita perbandingkan persepsi mereka dalam melihat sosok pemimpin. Maka dari itu rumusan masalah penelitian ini adalah **“Bagaimana perbandingan persepsi politik masyarakat terhadap kepemimpinan kepala daerah perempuan antara kabupaten Indramayu dan kabupaten Karawang?”**

1.3. Tujuan penelitian

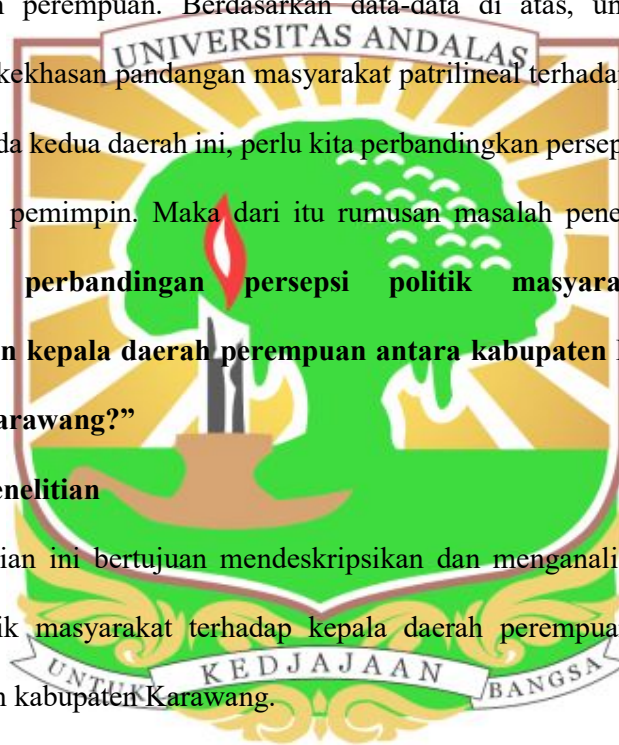
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa perbandingan persepsi politik masyarakat terhadap kepala daerah perempuan di Kabupaten Indramayu dan kabupaten Karawang.

1.4. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini akan bermanfaat untuk akademis dan teknis

a. Manfaat akademis

Harapan peneliti, penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan politik khususnya, menambah pengetahuan peneliti dan menjadi acuan



ketika sebuah penelitian yang hampir sama pada kajian persepsi politik masyarakat, gender, patriarki dan Budaya politik masyarakat Jawa Barat.

b. Manfaat praktis

Manfaat teknis penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan masukan bagi calon kandidat perempuan dalam berproses secara politik dan perkembangan aktivitas politik perempuan.

c. Manfaat sosial

Dapat menjadi pengetahuan baru yang akan menambah wawasan masyarakat tentang persepsi politik masyarakat, patriarki dan kesetaraan gender.

d. Manfaat teknis

Dapat menghasilkan teknik pengukuran yang valid dan realibel dalam mengukur perbandingan persepsi politik masyarakat.

